

Berita Lingkungan Hidup

Sinar Mas Verifikasi Laporan Greenpeace

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) menunjuk Control Union Certification (CUC) dan BSI Group (BSI). Dua badan sertifikasi internasional ini akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap laporan Greenpeace.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional itu sebelumnya mengklaim pembangunan perkebunan sawit milik perusahaan itu tidak memenuhi prinsip dan kriteria ramah lingkungan. Akibat klaim, dua perusahaan yakni Unilever dan Nestle melakukan pemutusan kontrak pembelian minyak sawit dari SMART.

Direktur Utama (Dirut) SMART, Daud Dharsono mengatakan kedua organisasi tersebut adalah badan sertifikasi yang telah mendapat persetujuan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). "Penunjukan CUC dan BSI telah melalui proses yang melibatkan konsultasi dengan Unilever, yang saat ini bertindak sebagai salah satu dewan eksekutif RSPO," kata Daud kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Daud berharap, penunjukan CUC dan BSI dapat memberikan kejelasan melalui verifikasi yang independen, ilmiah dan metode tersertifikasi atas isu-isu yang diangkat dalam laporan Greenpeace. "Proses verifikasi ini untuk memverifikasi klaim yang dikeluarkan oleh Greenpeace," ujarnya.

Dengan penunjukan tim independen, pihaknya tidak hanya berkomitmen terhadap produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, tapi juga berperan memberikan lapangan pekerjaan dan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

Karena itu, pihaknya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap tata kelola yang terbaik sebagai bagian dari komitmen penuh terhadap produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Bahkan pada awal Februari, SMART telah mengumumkan memperkuat rangkaian proses kerja.

"Ini untuk memastikan bahwa kami tidak mengembangkan lahan-lahan dengan kadar karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi," katanya.

Dengan demikian akan memberikan jaminan pada pemangku kepentingan bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk melestarikan hutan primer, lahan gambut serta keanekaragaman hayati. Karena itu sebagai produsen minyak kelapa sawit, SMART tunduk dan patuh kepada hukum perundang-undangan Indonesia, konvensi internasional yang telah diratifikasi pemerintah, serta prinsip-prinsip dan kriteria RSPO mengenai produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sementara itu Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Achmad Mangga Barani mengingatkan agar perusahaan perkebunan sawit Indonesia untuk siap mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi seperti kasus SMART. Sebab, persoalan yang terjadi dengan SMART, bukan hanya persoalan satu perusahaan saja.

"Ini persoalan perkebunan sawit secara nasional, sehingga kemungkinan bisa terjadi pada perusahaan lain. Karena itu kami harus introspeksi diri," kata dia.

Dengan adanya penunjukan tim independen oleh SMART, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan yang kini menghadang dalam pembangunan perkebunan sawit di Indonesia. Apalagi selama ini perkebunan sawit menjadi salah satu penggerak ekonomi.

Misalnya, sebagai penyedia lapangan kerja karena hampir 40 persen atau sekitar tiga juta perkebunan sawit itu milik rakyat. Selain itu perkebunan sawit menjadi pemasok devisa negara cukup besar. Pada 2006, sumbangan devisa dari minyak sawit baru mencapai US\$8 miliar. Namun dalam tiga tahun yakni pada 2009, sumbangan devisanya melonjak hingga US\$14 miliar-US\$15 miliar.

Pada tahun lalu Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi sebanyak 21-21,5 juta ton. Dengan konsumsi hanya 4,5 juta-5 juta ton, diperkirakan ekspor minyak sawit mencapai 15 juta-16 juta ton. Untuk tahun 2010, diperkirakan produksi minyak sawit Indonesia akan menembus angka 22,5 juta ton. Jika konsumsi naik menjadi enam juta ton, maka ekspor akan mencapai 16,5 juta-17 juta ton.

Karena itu, jika perusahaan perkebunan sawit mengikuti aturan yang berlaku, maka tidak perlu takut menghadapi kampanye negatif dari LSM internasional. Sebab, peraturan yang berlaku di Indonesia sudah mengikuti aturan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan yang ditetapkan dalam RSPO.

"Jadi selama mengikuti aturan pemerintah, itu sudah benar. Jangan sampai kami justru didikte LSM internasional," ujarnya.

Kini Indonesia sudah mempunyai *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang prosif dan kriterianya sudah mengacu aturan RSPO.